

# ANALISIS AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DEMI MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

(Studi Kasus pada Pemerintah Desa Kabupaten Brebes)

Kharisma Yosi Noviana, Haryanto<sup>1</sup>

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro  
Jl.Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6287749940788

## ABSTRACT

*This research aims to examine the effect of accountability, transparency and human resources on village financial management in the village government in Brebes District, Central Java Province. The population of this research is 292 villages in Brebes Regency. The sampling technique used a saturated sample, with a total sample of 169 respondents, namely village administration. This study uses primary data obtained by distributing questionnaires. The data analysis method used is multiple linear regression analysis. The results of the research that has been done show that accountability does not affect village financial management, while transparency has a positive effect on village financial management.*

*Keywords: Accountability, Transparency, Human Resources, Village Financial Management*

## PENDAHULUAN

UU No.6 Tahun 2014 mengamanatkan desa sehingga dapat mengatur pemerintahan juga beragam potensi alam yang dipunya memuat pengelolaan keuangan juga aset desa. Keuangan Desa berdasar Kebijakan Desa ialah segala hak juga kewajiban desa yang bisa diukur melalui uang beserta seluruh hal berbentuk uang juga komoditas yang berkenaan dengan penyelenggaraan hak juga kewajiban Desa.

Dengan memuat tugas yang besar berikut maka pemerintah desa sepatutnya mampu mengimplementasikan asas-asas pada tata pemerintahannya termasuk pengelolaan keuangan desa karenanya pada penyelenggaraan pemerintahan desa mampu diamankan terhadap warga selaras dengan ketetapan. Terbuka, akuntabel, kontributif juga dilangsungkan dengan disiplin serta tertib. Hal itu tercantum pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 merupakan asas-asas pengelolaan keuangan desa seperti halnya termuat.

Akuntabilitas dan transparansi memerankan peran yang sangat bernilai pada pelaksanaan pemerintah desa salah satunya pada pengelolaan keuangan desa. Dalam reformasi birokrasi pemerintahan akuntabilitas akan lebih ditekankan sehingga pemerintah desa dalam perwujudan kewajiban harus dapat mengamankan manajemen juga pengontrolan potensi beserta penyelenggaraan ketetapan yang diamankan bagi pencapaian orientasi awal yang sudah ditentukan terhadap warga desa sejalan dengan kebijakan undang-undang. Melalui transparansi pada tata kelola pemerintahan, warga bisa mendapati juga memperoleh akses data seluas mungkin berkenaan pengelolaan keuangan desa. Kaidah transparansi memungkinkan warga dalam memperoleh fakta yang jujur, benar juga toleran

---

<sup>1</sup> Corresponding author

---

serta memberikan umpan balik atas kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah yang dilangsungkan dengan memperhatikan ketetapan kebijakan perundang-undangan.

Penerapan asas transparansi juga akuntabilitas pada pengelolaan keuangan desa juga berupa usaha yang dikerjakan guna mendukung pelaksanaan tata Kelola pemerintahan yang membaik ataupun sebutan lainnya yaitu *good governance*. Menurut Haryanto (2007) *Good governance* adalah suatu mekanisme pelaksanaan ekspansi yang damai, konsisten juga selaras dengan kaidah kerakyatan yang tepat guna. Dalam bukunya juga mengungkapkan kontribusi warga, berdirinya hukum, terdapat keterbukaan yang dibangun berbasis arus fakta yang independent juga fakta patut dimasuki oleh pihak-pihak yang berpartisipasi. Perilaku responsive dengan seluruh stakeholder berfokus dalam keperluan warga secara meluas, adanya kesejajaran, efisiensi juga efektivitas, akuntabilitas, beserta adanya visi yang diplomatis merupakan prinsip-prinsip *good governance*

Dikutip dari PanturaPost terdapat Kepala Desa di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes ditahan berdasar asumsi penyalahgunaan kekuasaan pada manajemen juga pemanfaatan dana desa tahun anggaran 2020. Kerugian mendekati Rp 810 juta, yaitu berasal dari penggelapan Dana Desa (DD) sebesar Rp 314.583.310. Manajemen Distribusi Dana Desa (DD) senilai Rp 7.150.000, manajemen Bantuan Keuangan Provinsi (Banprov) senilai Rp 407.299.000. Bukan hanya itu pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu senilai Rp 16.000.000. Sebesar Rp 10.900.000 berasal dari pengelolaan pembagian perolehan retribusi serta Rp 50.000.000 diduga penggelapan atas Bank Kredit Desa (BKD).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwasanya pemerintah desa di Kabupaten Brebes dinilai masih kurang dalam implementasi kaidah *good governance* pada sistem pengelolaan keuangan desa. Hal berikut menarik peneliti guna mengerjakan riset bagi transparansi juga akuntabilitas atas pengelolaan keuangan desa dalam rangka menunjang *Good Governance*. Sukmawati dan Nurfitriani (2019) dengan angka partisipasi senilai 29,2% akuntabilitas juga transparansi berpengaruh bagi pengelolaan keuangan desa. Serta dengan tersendiri transparansi tidak berdampak bagi pengelolaan keuangan desa. Namun secara bersamaan

## KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

### *Agency Theory*

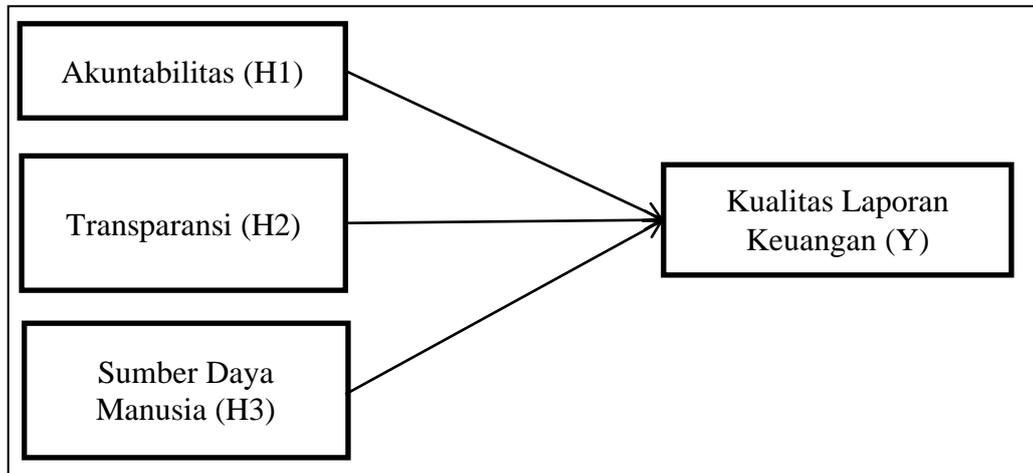
Riset ini menggunakan teori agensi yang mana berdasar pada *Agency theory*. Pengaplikasian teori agensi dalam pengelolaan keuangan desa yaitu, terdapat hubungan keagenan atau hubungan kontrak yang terjadi antara masyarakat (*principal*) yang memberikan amanah kepada pemerintah desa (*agen*) untuk melaksanakan tugas dalam mengelola keuangan desa. Konteks akuntabilitas muncul karena adanya pemisahan tugas antara pemilik dengan manajemen. Pemerintah desa harus mempertanggungjawabkan amanah dalam mengelola keuangan desa dengan baik dan sebaliknya Masyarakat memberikan kompensasi yaitu, umpan balik berupa kepercayaan politik pada pemerintah desa.

*Agency Theory* beranggapan bahwa banyak terjadi asimetris informasi antara pihak *agen* (pemerintah desa) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak *prinsipal* (masyarakat). Adanya asimetris informasi inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh *agen*. Pemerintah desa merupakan pihak yang memiliki wewenang dan informasi serta memegang kepercayaan yang diberikan oleh rakyat untuk menjalankan pemerintahan sehingga diharuskan memiliki kesadaran untuk terus mewujudkan transparansi serta akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas juga transparansi aparatur desa dapat diwujudkan yaitu melalui penyajian dan pengungkapan fakta yang lengkap dalam laporan keuangan selaras dengan kebijakan undang-undang.

## Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan hubungan antar variabel penelitian dalam bentuk skema. Penelitian ini menggunakan variabel dependen dan variabel independen.

**Gambar 1**  
**Kerangka Konseptual**



### **Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa**

Akuntabilitas erat kaitannya dengan kegiatan pemerintah sebab akuntabilitas, yakni kewajiban pemerintah terhadap kebutuhan warga karenanya dalam hal ini mendesak pihak pengelola (pemerintah) untuk melaksanakan program-program yang berpengaruh pada kesejahteraan dalam hal ini principals (masyarakat luas) sesuai dengan stewardship theory. Pemerintah sebagai pengelola juga mempunyai tanggung jawab dalam mempublikasikan fakta pengelolaan keuangan kepada publik dengan akuntabel juga transparan. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H1: Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Brebes

### **Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa**

Transparansi juga akuntabilitas adalah kunci tata kelola. Dengan akuntabilitas pemerintah berkomitmen guna mempresentasikan juga memberitahukan semua aktivitas yang ada khususnya di sektor pengelolaan finansial terhadap pihak yang lebih tinggi dan masyarakat luas. Akuntabilitas bisa dilakukan dengan melimpahkan akses terhadap seluruh pihak yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H2: Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Brebes

### **Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Pengelolaan Keuangan Desa**

Sumber daya manusia merupakan hal penting dalam pelaksanaan pemerintahan, khususnya pengelolaan keuangan desa. Dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa harus didukung dengan sumber daya manusia yang memadai agar tujuan-tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud. Kompetensi Sumber daya manusia merupakan faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas. Untuk meningkatkan akuntabilitas diperlukan adanya kompetensi (Frink dan Klimoski, 2004). Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H3: Sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Brebes

## METODE PENELITIAN

### Populasi dan Sampel

Populasi pada riset ini yaitu seluruh kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa atau kaur keuangan di Kabupaten Brebes. Sampel dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa atau kaur keuangan Kabupaten Brebes sebesar 169 responden. Sampel ini diambil dengan metode sampel jenuh, dimana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Jenis data dalam penelitian ini bersifat data kuantitatif dengan metode pengumpulan data bersumber pada data primer yaitu dengan mendistribusikan kuesioner.

### Variabel Penelitian

Variabel independen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas, transparansi dan sumber daya manusia. Sementara variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengelolaan keuangan desa. Ringkasan dari definisi operasional variabel dependen dan independen adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah penyajian data juga publikasi data (disclosure) berkenaan kegiatan juga capaian keuangan publik terhadap pihak-pihak yang berhubungan dengan laporan itu (Haryanto,2007).

2. Transparansi

Transparansi keuangan, yaitu menyediakan informasi keuangan jujur dan terbuka kepada publik atas dasar bahwa masyarakat berhak guna mendapati dengan transparan juga terperinci tentang tugas pemerintah dalam mengatur potensi yang diamanatkan terhadapnya juga menaati kebijakan undang-undang (Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2005 berkenaan Standar Pemerintahan).

3. Sumber Daya Manusia

Menurut Edy (2009) sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan karya (rasio, rasa, dan karsa). Menurut Arfianti, (2011) kualitas sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki oleh manusia yang ada didalam lingkup pekerjaan untuk menjalankan tugas yang telah diberikan berdasarkan ilmu pengetahuan, pendidikan, pelatihan, serta pengalaman yang telah diperoleh.

4. Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasar Permendagri No. 20 Tahun 2018 keuangan desa ialah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Seluruh aktivitas yang memuat perencanaan, penyelenggaraan, penatausahaan, pelaporan, juga pertanggungjawaban keuangan desa merupakan pengelolaan keuangan desa.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Objek Penelitian

Jumlah sampel penelitian ini adalah 169 responden. Pendistribusian kuesioner ini dikirimkan ke setiap balai desa baik dikirim secara langsung ke kantor maupun tidak langsung. Dari hasil pengisian kuesioner tersebut, mayoritas responden yang mengisi yaitu laki-laki berjumlah 131 orang (78%). Mayoritas usia responden yaitu rentang usia 31-40

tahun yang berjumlah 56 orang (33%). Kemudian mayoritas tingkat tingkat endidikan responden adalah SMA/SMK yaitu 78 orang (46%). Dan mayoritas lama bekerja responden adalah 1-5 tahun kerja yaitu 58 orang (34%).

**Uji Instrumen Data**  
**Uji Validitas**

Uji validitas ini digunakan untuk mengukur valid tidaknya pernyataan. Penelitian ini memakai *r* tabel sebesar 0,151 yang diperoleh melalui nilai sig 0,05 serta jumlah sampel (*n*) sebesar 169. Pernyataan pada kuesioner ini dinyatakan valid jika hasil  $r_{hitung} > r_{tabel}$ .

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	R Hitung Rata-rata	R Tabel	Keterangan
Akuntabilitas	0,529	0,151	Valid
Transparansi	0,692	0,151	Valid
Sumber Daya Manusia	0,627	0,151	Valid
Pengelolaan Keuangan Desa	0,514	0,151	

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan pada tabel diatas, semua *r* hitung rata-rata pada setiap variabel dalam penelitian ini berada diatas *r* tabel (0,151), sehingga variabel akuntabilitas, transparansi, sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan desa ini dinyatakan valid.

**Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas digunakan untuk melihat keandalan suatu kuesioner dari variabel penelitian yang digunakan. Pada uji reliabilitas penelitian ini diukur menggunakan *Cronbach Alpha* (*a*).

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach Alpha	Standard Alpha	Keterangan
Akuntabilitas	0,635	0,60	Reliabel
Transparansi	0,640	0,60	Reliabel
Sumber Daya Manusia	0,780	0,60	Reliabel
Pengelolaan Keuangan Desa	0,724	0,60	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil uji reliabilitas dari keempat variabel penelitian. Dapat disimpulkan bahwa keempat variable tersebut mempunyai nilai *Cronbach Alpha* diatas 0,6. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa kuesioner penelitian ini adalah reliabel.

**Statistik Deskriptif**

**Tabel 3**  
**Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviasi
Akuntabilitas	169	21,00	39,00	32,73	3,301
Transparansi	169	9,00	20,00	15,97	2,355

Sumber Daya Manusia	169	24,00	40,00	35,18	2.796
Pengelolaan Keuangan Desa	169	30,00	55,00	44,18	4,540

Sumber: data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel tersebut dapat diperoleh informasi bahwa variable X1 yaitu Akuntabilitas mempunyai nilai minimal 21 dan nilai maksimal 39 dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 32,73 dan standar deviasinya 3,301. Untuk variabel Transparansi mempunyai nilai minimal 9 dan maksimal 20 dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 15,97 dan standar deviasinya 2,355. Variable Sumber Daya Manusia memiliki nilai minimal 24 dan maksimal 40 dengan nilai rata-rata (mean) 35,18 dan standar deviasinya 2,796. Sedangkan variabel Pengelolaan Keuangan Desa memiliki nilai minimal 30 dan maksimal 55 dengan nilai rata-rata (mean) 44,18 dan standar deviasi 4,540.

### Uji Statistik t (Uji t)

Uji t dipakai untuk memberi informasi seberapa besar variabel independen membantu menjelaskan variabel dependen. Variabel independen memiliki keterkaitan secara parsial pada variabel dependen apabila signifikansinya < dari 0,05. Namun, apabila ambang signifikansi > 0,05, variabel independen memiliki keterkaitan yang kecil pada variabel dependen (Ghozali, 2018).

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Statistik t**

Variabel	t	Sig.
Akuntabilitas(X1)	1.012	0,313
Transparansi(X2)	12.488	0,000
Sumber Daya Manusia (X3)	11.846	0,000

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Dapat dilihat nilai sign variabel akuntabilitas sejumlah  $0,313 > 0,05$  juga angka t hitung  $1.012 < 1,974$ . Dengan demikian bisa diartikan bahwasanya H1 ditolak. Artinya, tidak ada pengaruh X1 terhadap Y.

### H1 Ditolak

Variabel transparansi diatas nilai sign sejumlah  $0,000 < 0,05$  juga angka t hitung  $12,488 > 1,974$ . Dengan demikian bisa diartikan bahwasanya H2 diterima yang artinya terdapat pengaruh X2 terhadap Y.

### H2 Diterima

Variabel sumber daya manusia tingkatan sign sejumlah  $0,000 < 0,05$  juga angka t hitung  $11,846 > 1,974$ . Dengan demikian bisa diartikan bahwasanya H2 diterima yang artinya ada pengaruh di antara X2 terhadap Y.

### H3 Diterima

### Uji Statistik Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mendapatkan informasi terkait signifikansi keterkaitan antara variable bebas dengan variable terikat secara bersamaan. Semua variabel bebas mempunyai pengaruh pada variabel terikat jika signifikansi uji < 0,05. Sedangkan jika nilai signifikansi

$> 0,05$  maka variabel independen tidak memiliki keterkaitan secara simultan pada variabel dependen.

**Tabel 5**  
**Hasil Uji F**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	228.860	3	76,287	97,291	0,000 <sup>b</sup>
	Residual	129.378	165	0,784		
	Total	358.238	168			

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan hasil uji F sebesar  $97,291 > 3,05$ , dan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Dengan demikian, bisa diartikan bahwasanya variabel independen berpengaruh pada variabel dependen secara simultan.

### **Interpretasi Hasil**

#### **Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut perolehan pengujian t-statistik didapatkan angka thitung senilai 1,012 dan signifikansi 0,313 yang artinya thitung di bawah ttabel ( $1,012 < 1,974$ ) juga tingkat signifikansi di atas ( $0,313 > 0,05$ ) sehingga bisa diartikan bahwasanya secara tersendiri variabel akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pengelolaan keuangan desa. Dari deskripsi itu bisa dimaknai bahwasanya dengan adanya akuntabilitas yang baik belum tentu pengelolaan keuangan desanya baik. Terlebih lagi dalam pelaksanaan akuntabilitas program di mana untuk dapat memprediksi apakah terdapat agenda yang tidak terlaksana dengan semestinya pada pengelolaan keuangan pada desa di Kabupaten Brebes belum memiliki rencana penanggulangan yang matang..

#### **Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa**

Berdasarkan perolehan pengujian t-statistik didapatkan angka thitung senilai 12.488 dan signifikansi 0,000 yang artinya thitung di bawah ttabel ( $12.488 > 1,974$ ) juga tingkatan signifikansi di atas ( $0,000 < 0,05$ ) sehingga bisa diartikan bahwasanya secara tersendiri variabel akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap variabel pengelolaan keuangan desa. Hal ini mengindikasikan bahwa transparansi merupakan faktor pendukung pengelolaan keuangan yang baik. Transparansi menanggung akses ataupun independensi dalam mendapatkan fakta mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu fakta mengenai peraturan, prosedur pembentukan juga penyelenggaraannya beserta capaian yang dihasilkan.

#### **Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa**

Berdasarkan perolehan pengujian t-statistik didapatkan angka thitung senilai 11.846 dan signifikansi 0,000 yang artinya thitung di bawah ttabel ( $11.846 > 1,974$ ) juga tingkatan signifikansi di atas ( $0,000 < 0,05$ ) sehingga bisa diartikan bahwasanya secara tersendiri variabel akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap variabel pengelolaan keuangan desa. Dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh aparatur desa dalam mengelola keuangan desa diharapkan visi, misi, dan tujuan dari organisasi dapat tercapai. Kompetensi seseorang dapat dilihat dari latar belakang yang kompeten dibidangnya, pelatihan yang pernah diikuti, dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap aparatur desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aparatur desa memiliki pengetahuan dibidangnya dan mampu mengelola keuangan desa sesuai dengan anggaran desa yang telah tersedia. Hal tersebut tidak dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, usia, jenis kelamin maupun lama bekerja dari aparatur desa tersebut.

## KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil olah data di atas, variabel transparansi dan sumber daya manusia secara simultan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Brebes. Sedangkan variabel akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Brebes.

### Keterbatasan

Faktor berikut menjelaskan sebagian keterbatasan penelitian:

1. Penggunaan sampel riset hanya mencakup pemerintah desa Kabupaten Brebes.
2. Variabel yang digunakan hanya dua yakni dependent variable juga independent variable.
3. Variabel independent yang dimanfaatkan untuk mengukur pengaruh terhadap variabel dependen (pengelolaan keuangan desa) hanya akuntabilitas dan transparansi
4. Dalam proses pengambilan data melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden tidak dapat menunjukkan keadaan yang sebenarnya dikarenakan beberapa faktor seperti perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman antar responden, suasana saat pengisian kuesioner, dan kejujuran saat pengisian kuesioner sehingga hasil yang diperoleh tidak dapat menjadi jaminan dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

### Saran

Berdasarkan dengan keterbatasan di atas, diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas jaringan sampel yang tidak hanya lingkup kabupaten namun sampai provinsi dan diharapkan agar dapat menambahkan indikator-indikator lain yang digunakan sebagai variabel independen agar dapat diketahui seberapa besar pengaruhnya terhadap pengelolaan keuangan desa. Selain itu untuk perangkat desa dimaksudkan bisa makin menambahkan akuntabilitas juga transparansi sehingga pada pengelolaan keuangan desa akan mampu menghasilkan output laporan yang terpercaya dan dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban kepada masyarakat. Serta lebih mempermudah masyarakat guna mengakses laporan keuangan yang mereka kelola dan memperluas akses yang ada karena dapat dilihat bahwa pada website desa seterhadapan besar kosong dan hanya dijadikan sebagai formalitas.

## REFERENSI

- Adianto Asdi Sangki, Ronny Gosal dan Josef Kairupan. (2016). Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Teorian Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of management*, 16(1).
- Fauzani, F. M., Purwati, A. S., & Sudjono, S. (2018). Analisis Persepsi Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 8(1).

- Ghozali. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Semarang : Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Haryanto, Sahmuddin, & Arifuddin. (2007). Akutansi Sektor Pubklik (Edisi Pert). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kumalasari, Deti. (2016). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(11).
- Mardiasmo. (2000). Akuntansi Keuangan Dasar. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Nafidah, Lina Nasehatun dan Nur Anisa. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(2).
- Nurkhasanah, I. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan, dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Putu Andi Suar Jaya Putra, Kadek Sinarwati dan Made Arie Wahyuni. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. *Jurnal Akuntansi Program S1*, 8(2).
- Rinjani, Siti Utami. (2020). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wakan Lombok Timur. *Jurnal Humanitas*, 6(2).
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie, (2017), Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian, Edisi 6, Buku 1, Cetakan Kedua, Salemba Empat, Jakarta Selatan 12610.
- Subroto, A. (2009). Akuntabilitas pengelolaan dana desa (Studi Kasus Pengelolaan Dana Desa di Desa-desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Universitas Diponegoro.
- Sujarweni, V.Wiratna. (2014). Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). Akuntansi Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Sukmawati dan Nurfitriani. (2019). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut). *Jurnal Ilmu Bisnis, Pasar Modal, dan UMKM*, 2(1).
- Umami, Risyah dan Idang Nurodin. (2017). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 6(11).
- Widiawaty, N. A. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.